

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Peran Generasi Muda Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Era Digitalisasi

Rahmaniyah¹, Wiwin Septiani², Desta Ahmad Saputra³, Ayudya Puja Astiti⁴

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, rahmaniyah310@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, septianiwiwin70@gmail.com.

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, destroahmad@gmail.com.

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, astitiayudyapuja@gmail.com

Abstrak: Era digital telah membawa perubahan mendasar dan dinamis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara praktik demokrasi berjalan dan berkembang. Artikel ini bertujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana generasi muda, dengan karakteristik adaptif dan pemahaman teknologi mereka, dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel di era digital. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan manfaat signifikan berupa panduan strategis yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan generasi muda, serta meningkatkan kesadaran publik yang lebih luas mengenai potensi besar dan berbagai tantangan partisipasi politik di era digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan proses pengumpulan, penelaahan, dan analisis sistematis terhadap beragam sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi yang sangat besar sebagai pilar utama demokrasi digital, mampu mendorong partisipasi politik melalui platform online, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta menjadi garda terdepan dalam melawan disinformasi dan berita palsu melalui literasi digital yang kuat, meskipun demikian, tantangan seperti polarisasi opini dan isu etika berdemokrasi di ruang siber juga perlu diatasi secara serius.

Kata Kunci: *Generasi Muda, Demokrasi Digital, Literasi Digital, Partisipasi Politik dan Era Digitalisasi.*

*Correspondence Address: rahmaniyah310@gmail.com.

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ (Zuhro. 2019). Pemerintahan dari rakyat bukan hanya sekadar menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, tetapi juga memiliki sejumlah implikasi yang lebih dalam. Lebih dari itu, konsep "dari rakyat" juga membawa pemikiran bahwa kebijakan publik seharusnya menggambarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan sekelompok elite tertentu. Pemerintahan oleh rakyat menekankan bagaimana kekuasaan dioperasikan. Tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, dan

penyampaian aspirasi. Pemerintahan untuk rakyat menekankan tujuan inti dari sistem demokrasi. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keputusannya dan bersedia untuk dikoreksi apabila kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu di antaranya melalui jaringan Internet (Husaini. 2017). Transformasi ini memberikan pengaruh besar terhadap cara orang berinteraksi, terlibat, dan memahami isu-isu sosial serta politik. Khususnya bagi generasi muda, kemudahan akses terhadap informasi yang melimpah ini menciptakan peluang besar untuk lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mendukung praktik demokrasi. Dengan kemampuan untuk menyaring dan menganalisis informasi, generasi muda dapat berperan sebagai agen perubahan penting dalam membentuk pandangan publik dan mengawasi proses demokrasi di era digital saat ini. Mereka tidak lagi hanya sekadar penerima informasi, tetapi menjadi pelaku aktif yang dapat menyebarkan ide- ide, mengorganisir gerakan sosial, serta mengungkapkan aspirasi mereka dengan lebih luas dan cepat. Peran ini menjadi semakin kritis mengingat adanya tantangan disinformasi dan hoaks yang meningkat di dunia digital, yang menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik agar informasi yang tepat dan bertanggung jawab dapat menjadi dasar bagi partisipasi demokratis.

Generasi milenial juga merupakan pengguna sosial media yang sangat fanatik dan bahkan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Selain itu, mereka juga lebih terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi sehingga sangat reaktif terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan di sekelilingnya (Anggono & Damaitu. 2021). Ciri ini menjadikan generasi milenial sebagai kelompok yang sangat menjanjikan untuk memajukan dinamika demokrasi di era digital. Kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah sosial, menyuarakan pendapat, dan bahkan mengatur gerakan daring dengan cepat difasilitasi oleh platform digital dan akses informasi yang mudah. Kesadaran mereka terhadap perubahan dan kemauan untuk mengambil peran aktif dalam memantau transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang semuanya merupakan landasan demokrasi, merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena itu, memberikan literasi digital dan pemahaman yang kuat tentang dasar- dasar demokrasi kepada generasi milenial sangat penting untuk membina masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.

Maka dari itu, artikel ini akan membahas secara mendalam peran generasi muda dalam mewujudkan demokrasi digital yang inklusif dan berkualitas. Kami akan mengkaji bagaimana mereka dapat memanfaatkan potensi teknologi informasi untuk memperkuat partisipasi politik, mempromosikan transparansi, dan menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat. Lebih lanjut, artikel ini juga akan mengeksplorasi strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul, termasuk pentingnya pendidikan literasi digital dan pengembangan etika berinternet, guna memastikan bahwa kontribusi generasi muda benar-benar berdampak positif bagi masa depan demokrasi di era digitalisasi.

METODE | METHOD

Metode yang di gunakan adalah metode studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur atau artikel hasil penelitian. Tujuannya untuk mengumpulkan hasil penelitian terkait yang kemudian dideskripsikan untuk memperluas khazanah pembahasan (Faiz, dkk. 2022). Dengan cara ini, penelitian ini dapat merangkum berbagai sudut pandang dan temuan dari penelitian sebelumnya. Ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik yang dibahas, sekaligus menemukan celah pengetahuan yang bisa diteliti lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Literasi Digital Dan Kesadaran Berdemokrasi

Dalam hal merangkul teknologi baru, kaum muda memimpin. Mereka lebih inventif dan berpikiran terbuka, menghasilkan penemuan yang berpotensi mengubah cara hidup dan pekerjaan kita. Kaum muda yang melek teknologi dapat menjadi agen perubahan dan mendorong transformasi digital di berbagai industri, termasuk bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Kaum muda dapat dengan mudah mengekspresikan pemikiran dan tujuan mereka melalui platform digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi kebijakan publik dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan (Hidayah, dkk. 2024). Melalui forum diskusi dan grup di media sosial, generasi muda berpartisipasi dalam perbincangan mengenai demokrasi, termasuk hak untuk berbicara dan melibatkan masyarakat. Platform digital juga memberikan informasi mengenai hak asasi manusia dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga meningkatkan kesadaran mereka. Di zaman digital ini, teknologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jutaan orang menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk membagikan informasi. Zaman ini mempengaruhi politik dengan meningkatkan kesadaran politik di antara generasi muda. Media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi politik melalui kampanye dan konten yang menarik, mendorong partisipasi yang lebih luas.

Di era digital, memperoleh informasi menjadi sangat mudah. Namun, kemudahan ini juga membawa konsekuensi negatif, terutama penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan secara luas. Masalah ini dapat menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis, karena orang sering menerima informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasinya. Akibatnya, prinsip-prinsip Pancasila, seperti kebenaran dan keadilan, secara bertahap terkikis. Lebih jauh lagi, meningkatnya polarisasi politik dan sosial menghadirkan tantangan bagi kaum muda. Kesenjangan pendapat yang semakin besar dapat menghalangi dialog dan musyawarah, yang merupakan nilai-nilai vital dalam Pancasila. Akibatnya, kapasitas untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kolaboratif menjadi berkurang. Evolusi teknologi informasi juga berdampak signifikan pada nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, teknologi dapat memfasilitasi akses ke informasi dan meningkatkan persatuan. Di sisi lain, teknologi dapat menimbulkan masalah baru seperti kecanduan gadget, masalah privasi data, dan kesenjangan digital. Gangguan-gangguan ini dapat mengalihkan fokus dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dirangkul dalam Pancasila. Selain itu, globalisasi budaya membawa dampak yang pelik terhadap nilai-nilai Pancasila. Kuatnya pengaruh budaya asing dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, generasi muda saat ini sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar, mulai dari pola bahasa, busana, hingga kebiasaan sehari-hari (Ulfa. 2024).

Literasi digital di era modern mengacu pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan secara bijak memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media digital. Era digital yang berkembang pesat telah membawa manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah munculnya berita bohong di media sosial. Misinformasi dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan bahkan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik. Informasi yang salah dapat memicu kepanikan, mengikis kepercayaan, dan berpotensi memicu tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk memverifikasi keakuratan informasi sebelum

membagikannya atau mengambil tindakan apa pun berdasarkan informasi tersebut. Melalui literasi digital, orang dapat lebih memahami dan mengelola informasi yang beredar di platform sosial. Dengan meningkatkan literasi di era digital, individu dapat membedakan antara informasi yang benar dan berita bohong, menahan diri dari menyebarkan kebohongan, dan terlibat dengan media sosial secara bertanggung jawab. Strategi untuk meningkatkan literasi digital meliputi pendidikan dini, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran interaktif, mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan mempromosikan kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap untuk menavigasi kompleksitas informasi di era digital, membangun literasi digital sebagai landasan berpikir kritis, kecerdasan, dan keamanan dalam berinteraksi dengan konten digital. Melalui upaya kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, lebih andal, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (Salsabila, dkk. 2024).

2. Partisipasi Politik Digital

Dalam era demokrasi modern, partisipasi generasi muda menjadi penentu penting dalam memperkuat sistem politik yang inklusif dan responsif. Berdasarkan studi oleh Kurniawansyah dkk. (2025), Gen Z memegang peran krusial dalam Pilkada 2024, tidak hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena karakteristiknya sebagai generasi digital native. Meski memiliki potensi signifikan, keterlibatan mereka dalam politik masih menghadapi sejumlah tantangan seperti apatisme, minimnya literasi politik, dan dominasi informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Sejalan dengan itu, media sosial kini menjadi sarana utama bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi politik. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter digunakan untuk menyuarakan isu-isu publik, menyelenggarakan kampanye, hingga memantau kebijakan pemerintah. Fitur interaktif seperti live streaming dan komentar memungkinkan generasi muda untuk berdialog langsung dengan tokoh politik maupun aktivis, memperluas ruang diskusi demokratis (Arsyad, dkk. 2024).

Contoh konkret dari aktivisme digital ini dapat dilihat dalam kampanye #ReformasiDikorupsi, di mana ribuan anak muda menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK melalui media sosial dan petisi daring. Situs seperti Change.org juga telah menjadi alat efektif untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, sosial, dan pendidikan. Meski masih menghadapi tantangan seperti disinformasi dan polarisasi politik, ruang digital tetap memiliki potensi besar dalam menghidupkan budaya partisipasi politik yang lebih dinamis (Fitriani, dkk. 2023).

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi telah menghadirkan sistem e-voting, yang mempermudah proses pemungutan suara secara elektronik. Inovasi ini dianggap sebagai terobosan penting dalam mendorong efisiensi, keamanan, serta inklusivitas pemilu, khususnya bagi mereka yang sulit menjangkau tempat pemungutan suara seperti difabel dan diaspora Indonesia di luar negeri (Sadam, dkk. 2024). Dengan e-voting, generasi muda dapat lebih mudah menyalurkan suara mereka secara praktis dan cepat, tanpa meninggalkan peran kritis mereka sebagai penjaga demokrasi. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan edukatif yang diusulkan KPU dan penetrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari anak muda dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pemilu yang partisipatif dan berintegritas. Generasi muda bukan sekadar objek pemilu, tetapi subjek aktif dalam membentuk arah demokrasi Indonesia yang lebih terbuka dan modern.

3. Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dalam Demokrasi Digital

Generasi muda masa kini tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga inovator dalam ruang digital yang terus berkembang. Kehadiran mereka di media sosial

dan platform daring lainnya menunjukkan pergeseran pola partisipasi politik yang tidak lagi terbatas pada ruang konvensional. pembelajaran kewarganegaraan digital sangat penting untuk memperkuat peran aktif generasi muda dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Media digital memberi peluang bagi mereka untuk mengembangkan platform inovatif seperti aplikasi pelaporan publik, kanal komunikasi dengan wakil rakyat, dan ruang dialog interaktif yang memperkuat keterlibatan warga dalam pemerintahan (Khansa. 2022).

Generasi Z memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam menyampaikan aspirasi politik. Kreativitas mereka terlihat dalam penggunaan konten visual, meme, dan kampanye digital yang mampu menjangkau khalayak luas. Inovasi ini mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan partisipasi publik, dan menjadikan isu politik lebih menarik di mata sesama generasi muda. Kampanye digital melalui media sosial tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif, memungkinkan mereka membangun narasi sendiri terhadap isu-isu sosial yang dihadapi (Dela, dkk. 2023).

Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tetap relevan di era globalisasi digital. Melalui kreativitas, generasi muda dapat mengembangkan bentuk-bentuk komunikasi politik baru yang lebih inklusif dan partisipatif, seperti vlog politik, podcast tentang isu kebijakan publik, dan forum daring untuk advokasi (Antoni. 2025).

Inovasi juga tampak dalam penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan big data untuk memantau dinamika sosial politik. Generasi muda dapat menganalisis perilaku politik masyarakat dan menyusun strategi kampanye yang lebih efektif. Bahkan, beberapa komunitas digital pemuda sudah mulai mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk edukasi pemilu dan pelaporan pelanggaran kampanye. Dengan pendekatan ini, mereka bukan hanya menjadi pengamat, melainkan pelaku yang aktif membentuk lanskap demokrasi digital Indonesia. Inovasi dan kreativitas mereka menjadi kunci dalam menciptakan tatanan politik yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman (Tinambunan, dkk. 2024).

4. Tantangan dan Risiko Demokrasi Digital bagi Generasi Muda

Meskipun peluang demokrasi digital sangat menjanjikan, generasi muda juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah perlindungan data pribadi. Keterlibatan pemuda dalam media sosial untuk tujuan politik dapat membuka celah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketidaksadaran terhadap pentingnya privasi menyebabkan generasi muda rentan menjadi korban manipulasi digital. Masalah ini semakin kompleks ketika data pribadi digunakan dalam algoritma untuk mempengaruhi preferensi politik melalui iklan yang ditargetkan secara spesifik (Suryawijaya, dkk. 2024).

Selain itu, ruang digital sering kali menjadi arena polarisasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Fenomena filter bubble dan echo chamber menyebabkan individu hanya berinteraksi dengan pandangan yang sejalan, sehingga membatasi keberagaman opini (Yulianti, dkk. 2024). Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kualitas dialog demokratis dan memperburuk konflik sosial. Pemuda yang aktif di ruang digital juga kerap mengalami tekanan psikologis akibat perdebatan yang bersifat konfrontatif serta penyebaran hoaks yang masif. Ini menuntut kesiapan emosional dan intelektual agar tidak terjebak dalam ekstremisme digital.

Disinformasi, ujaran kebencian, dan cyberbullying menjadi risiko lain yang mengintai generasi muda. Literasi digital yang rendah dapat membuat generasi muda terjebak dalam narasi palsu yang mengaburkan fakta. Ketidaksiapan menghadapi

dinamika ini bisa menyebabkan apatisme politik atau bahkan radikalisasi digital. Untuk itu, diperlukan intervensi edukatif dari berbagai pihak guna memperkuat kemampuan berpikir kritis dan etika dalam berkomunikasi daring. Selain itu, dukungan regulasi yang ketat terhadap penyalahgunaan media sosial dan perlindungan pengguna juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan (Antoni. 2025).

Faktor ketimpangan akses digital juga memperparah tantangan demokrasi digital. Generasi muda di daerah terpencil belum tentu memiliki akses internet yang memadai, sehingga mereka cenderung terpinggirkan dari ruang partisipasi (Khans. 2022). Kurangnya infrastruktur dan biaya akses internet yang tinggi menjadi hambatan utama dalam menciptakan demokrasi digital yang merata. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan aman. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan afirmatif yang mendukung pemerataan akses teknologi, sementara lembaga pendidikan harus memperkuat kurikulum literasi digital sejak usia dini.

5. Pendidikan Dan Pemberdayaan Generasi Muda Untuk Demokrasi

Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, hampir semua aktivitas kini melibatkan teknologi, termasuk dalam ranah politik. Inovasi teknologi telah merubah cara komunikasi dalam politik, membuat akses informasi lebih luas bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam politik adalah bentuk nyata dari demokrasi, yang akan memperkuat nilai-nilai demokrasi, di antaranya nilai-nilai seperti: keterbukaan, kebebasan, dan peraturan yang ada (Nursetiani, dkk. 2024).

Perkembangan teknologi informasi di zaman digital memberikan dampak besar pada berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam pembentukan identitas bangsa. Budaya digital, yang meliputi pemanfaatan teknologi dan media digital, telah menjadi bagian integral dari rutinitas masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda. Budaya digital mencerminkan aktivitas sosial di dunia daring sambil tetap menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan keragaman. Penting untuk memperhatikan nilai-nilai budaya digital dan mengintegrasikannya sebagai kebiasaan dalam menciptakan karakter yang baik. Dalam rangka membangun pemahaman global bagi warga negara muda, Pendidikan Kewarganegaraan lebih fokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki sikap dan niat melakukan interaksi dengan orang lain berdasarkan prinsip-prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pendidikan Kewarganegaraan dan Wawasan Nusantara memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter bangsa dengan memadukan nilai-nilai budaya digital yang positif. Pendidikan Kewarganegaraan bertindak sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Pendidikan Kewarganegaraan umumnya dipandang sebagai pendidikan karakter karena berisi nilai-nilai luhur Pancasila, yang diharapkan mampu membangun moralitas individu. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi pada perkembangan moral bangsa Indonesia, karena moralitas menjadi bagian dari diri setiap individu dan kemampuan kemanusiaannya. Namun, seseorang dianggap bermoral jika ia menerapkan nilai-nilai baik dalam perilakunya. Sebaliknya, individu yang berperilaku buruk, seperti egoisme, dianggap tidak bermoral. Moralitas menjadi salah satu landasan utama bagi manusia untuk berbuat baik terhadap sesama dalam pembentukan karakter. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang cerdas, kritis, kreatif, responsif, dan aktif (Saddam, dkk. 2025).

Era digital juga menghadirkan kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan. Digitalisasi mendorong pemerintah untuk menjalin komunikasi yang lebih transparan dengan masyarakat. Informasi yang dapat diakses secara online

memberi kesempatan bagi warga untuk mengawasi aktivitas pemerintah, yang berpotensi memperbaiki akuntabilitas pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Pemberdayaan masyarakat juga berperan penting dalam pengembangan demokrasi di masa digital. Teknologi digital dapat berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform lainnya, masyarakat dapat mengatur kampanye politik serta ikut serta dalam kegiatan politik. Dengan cara ini, teknologi digital dapat memperkuat peran masyarakat dalam arena politik dan memperkuat suara mereka dalam memengaruhi kebijakan. Demokrasi digital merupakan sekumpulan usaha untuk melaksanakan demokrasi tanpa batasan ruang, waktu, atau kondisi fisik, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta komunikasi berbasis komputer (Darnawati, dkk. 2024).

6. Etika Dan Tanggung Jawab Dalam Demokrasi Digital

Etika berkomunikasi di platform media sosial adalah topik penting untuk memastikan keharmonisan dan kesopanan di dunia digital. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia kurang memperhatikan etika komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan menghargai pendapat orang lain. Konsekuensinya, ini menyebabkan berbagai ketegangan di antara pengguna media sosial yang akhirnya bisa menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat. Dalam aspek hukum, etika komunikasi tidak hanya berhubungan dengan norma sosial, tetapi juga dengan hukum yang bersumber dari moralitas serta kode etik profesional. Profesi hukum seperti pengacara, notaris, dan konsultan hukum memiliki standar etika yang ketat, yang mengatur cara komunikasi dan interaksi yang dilakukan di lingkungan profesional. Namun, dalam hal media sosial, standar etika ini masih belum banyak diterima oleh masyarakat luas, terutama oleh orang-orang yang tidak terikat dengan profesi tertentu (Siahaan. 2024)

Komunikasi merupakan suatu proses yang mengharuskan adanya kesetaraan dalam posisi dan interaksi antara berbagai pihak. Umpan balik serta dialog menjadi prasyarat esensial dari setiap kegiatan komunikasi. Dalam konteks komunikasi massal atau yang berlangsung melalui media massa, hal ini justru menghadirkan sebuah kontradiksi. Proses komunikasi dalam skala besar cenderung bersifat sepihak. Para pemirsa televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar tergolong dalam kategori massa yang tidak mengenal satu sama lain dan bersikap pasif. Mereka tidak berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan hanya menerima pesan dari media tanpa memberikan umpan balik. Media sosial menghilangkan batasan antara sumber informasi atau jurnalis dengan audiens publik seperti yang terjadi pada media massa. Kini, tidak ada lagi kategori massa, sebab setiap pengguna media sosial dapat berperan sebagai peserta dalam diskusi serta aliran pertukaran informasi dan opini. Media sosial tidak hanya mampu mengatasi kontradiksi yang ada dalam komunikasi massa, tetapi juga dalam ranah demokrasi. Sebelum kemunculan media sosial, dunia politik terbatas pada kalangan elite. Masyarakat hanya terlibat dalam politik setiap lima tahun sekali saat pemilihan umum berlangsung. Antara pemilu yang satu dengan yang lainnya, politik dikuasai oleh para elite, sementara mayoritas masyarakat cenderung menjauh dari politik dan pemerintahan. Tugas pengawasan hanya dilakukan oleh media massa dan sedikit oleh lembaga swadaya masyarakat. Dengan kemunculan media sosial, politik tidak lagi menjadi monopoli kelompok elite. Masyarakat kini memiliki alat untuk membahas serta mengawasi jalannya pemerintahan secara efektif. Mereka juga dapat melaksanakan agenda-agenda politik mereka sendiri (Sudibyo. 2018).

KESIMPULAN | CONCLUSION

Peran generasi muda dalam mendukung praktik demokrasi di era digital sangat penting dan menjanjikan. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi serta literasi digital yang semakin berkembang, mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam memperkuat partisipasi politik, menjaga transparansi pemerintahan, dan memerangi penyebaran informasi palsu. Generasi ini bukan hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan penyebar gagasan yang berpengaruh di ruang publik digital. Meski demikian, berbagai tantangan seperti disinformasi, polarisasi sosial, serta risiko pelanggaran privasi menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan literasi digital, etika berinternet, serta pemberdayaan politik generasi muda menjadi hal yang sangat mendesak guna menciptakan ekosistem demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penyusunan artikel ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kami, sebagai penulis, ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan peneliti atas kolaborasi dan bantuannya yang telah memungkinkan artikel ini terselesaikan. Semoga kontribusi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI | REFERENCE

- Antoni, H. (2025). Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Pemahaman Generasi Z Tentang Pancasila. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/390863798>
- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media Sosial Sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh Terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 240-251.
- Darnawati, Rahayu, Maulia, S. T. (2024). Demokrasi Di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. 3(7).
- Dela Rosa, V., Fadhila, D., Salsabilla, N., Anwar, R. S. T., & Randa, M. (2023). Peran Generasi Z dalam Pemilu yang Bersih dan Demokratis. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/27252>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru Dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550.
- Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.
- Hidayah, R. M. W., Abidin, E. S., Arifin, I., & Ahmad, M. R. S. (2024). Membangun Kesadaran Politik: Pentingnya Partisipasi Generasi Muda Di Era Digital. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 1(02), 74-77.
- Husaini, M. (2017). Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan (eeducation). *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1).
- Kurniawansyah, E., Oktafia, N., Agatin, A. R., Fitriani, L., Saputri, N. E., Nazwa, N. A., Amini, L. A. A., & Zubair, M. (2025). Tantangan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z pada Pilkada di Kota Mataram 2024. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 7(1), 31–40.
- Tersedia di: <https://scholar.google.com/citations?user=UF9K834AAAAJ>

- Khansa, A. (2022). Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Digital untuk Generasi Z. Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi Pembelajaran. <https://conference.ut.ac.id/index.php/ting/article/download/5062/1917>
- Nursetiani, A. , Aprilia, C. D. , Sulistyaningsih, D. I. , Gunafi, G. I. , Ferahma, V. S. (2024). Pendidikan Politik Pada Generasi Milenial: Membangun Kesadaran Demokrasi Di Era Digital. *Pena Edukasi*. 3(2). 49-53.
- Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Di Media Sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45-54.
- Sadam, M., Al Araafi, F., & Arafah, Y. (2024). Demokrasi Dan Transformasi Digital: Analisis Digitalisasi Politik Melalui Penerapan E-Voting Dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 218-234.
- Saddam, Maemunah, Rahmadari, I. A., Arisandi, A. (2025). Membangun Karakter Bangsa Melalui Digital Culture : Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Wawasan Nusantara Dalam Menghadapi Tantangan Perundungan Siber. *Elementary School Teacher Journal*. 8(1). 46-56.
- Siahaan, A.L.S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 796-801.
- Sudibyo, A. (2018). Media Sosial, Demokrasi Dan Problem Etika. *Jurnal Visioner*. 02(1). 1-13
- Suryawijaya, T., Fauzy, M. R. N., & Maulidina, N. F. (2024). Peran Media Sosial dalam Membentuk Partisipasi Politik Gen Z pada Pemilu 2024. *Politica*, 15(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4441>
- Tinambunan, C. P., Syailendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/387843202>
- Ulfa, M. (2024). Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi. Book Chapter Of Proceedings *Journey-Liaison Academia And Society*, 1(1), 43-63.
- Yulianti, D. B., Dewi, D. S. K., & Djuwitaningsih, E. W. (2024). Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024: Membangun Kesadaran Politik pada Generasi Z. *Mallomo: Journal of Community Service*, 5(1). <https://jurnal.umrappang.ac.id/mallomo/article/download/1533/1148/>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. *Journal Of Political Research*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/Jpp.V16i1.782>